

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi panel mengenai Analisis Determinan yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan, maka hasil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan. Nilai koefisien sebesar 5.508328 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 derajat signifikan 5 persen. Artinya dengan terjadinya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebesar 1 Rp maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 5.51%.
- 2) Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks- Karesidenan Pekalongan. Nilai koefisien sebesar -0.065270 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0743 derajat signifikan 5 persen. Artinya dengan terjadinya kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1% maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.65%.

- 3) Penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan. Nilai koefisien sebesar -3.164446 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 derajat signifikan 5 persen. Artinya dengan terjadinya kenaikan Jumlah Penduduk Miskin sebesar 1 ribu jiwa maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3.16%.
- 4) Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Eks-Karesidenan Pekalongan. Nilai koefisien sebesar 0.201258 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0254 derajat signifikan 5 persen. Artinya dengan terjadinya kenaikan Pertumbuhan Ekonomi 1% maka akan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.25%.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- 1) Pemerintah daerah harus membuat kebijakan-kebijakan untuk menekan angka kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan dapat diturunkan guna untuk meningkatkan pembangunan manusia. Peran aktif pemerintah

diperlukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan. Dengan berkurangnya kemiskinan diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

- 2) Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang dapat memberikan upah yang layak. Upah minimum kabupaten/kota tetap perlu untuk ditingkatkan guna mendorong pendapatan masyarakat. Dengan begitu masyarakat diharapkan mempunyai daya beli yang lebih besar dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tingkat kesehatan dan pendidikan juga dapat meningkat. Sehingga dengan terwujudnya kondisi tersebut diharapkan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.
- 3) Untuk mengatasi meningkatnya jumlah pengangguran, peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan cara membuka lebar lapangan pekerjaan, sehingga dengan terbukanya lapangan pekerjaan diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Dengan demikian masalah pengangguran dapat teratasi dengan baik.
- 4) Dalam meningkatkan IPM di kabupaten/kota maka pemerintah perlu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Upaya untuk menciptakan output daerah diharapkan

akan mampu juga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang meningkat, penurunan jumlah pengangguran, dan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah tersebut dapat meningkatkan IPM.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup empat variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu upah minimum Kabupaten/Kota, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun juga terlepas dari keempat variabel tersebut masih banyak variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Namun, dikarenakan adanya keterbatasan data *time series* dan jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain dan juga metode lainnya untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia sehingga diharapkan dapat memberikan analisis data yang lebih baik terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan.

